Prof. Dr. H. Zaidan Nawawi, M.Si

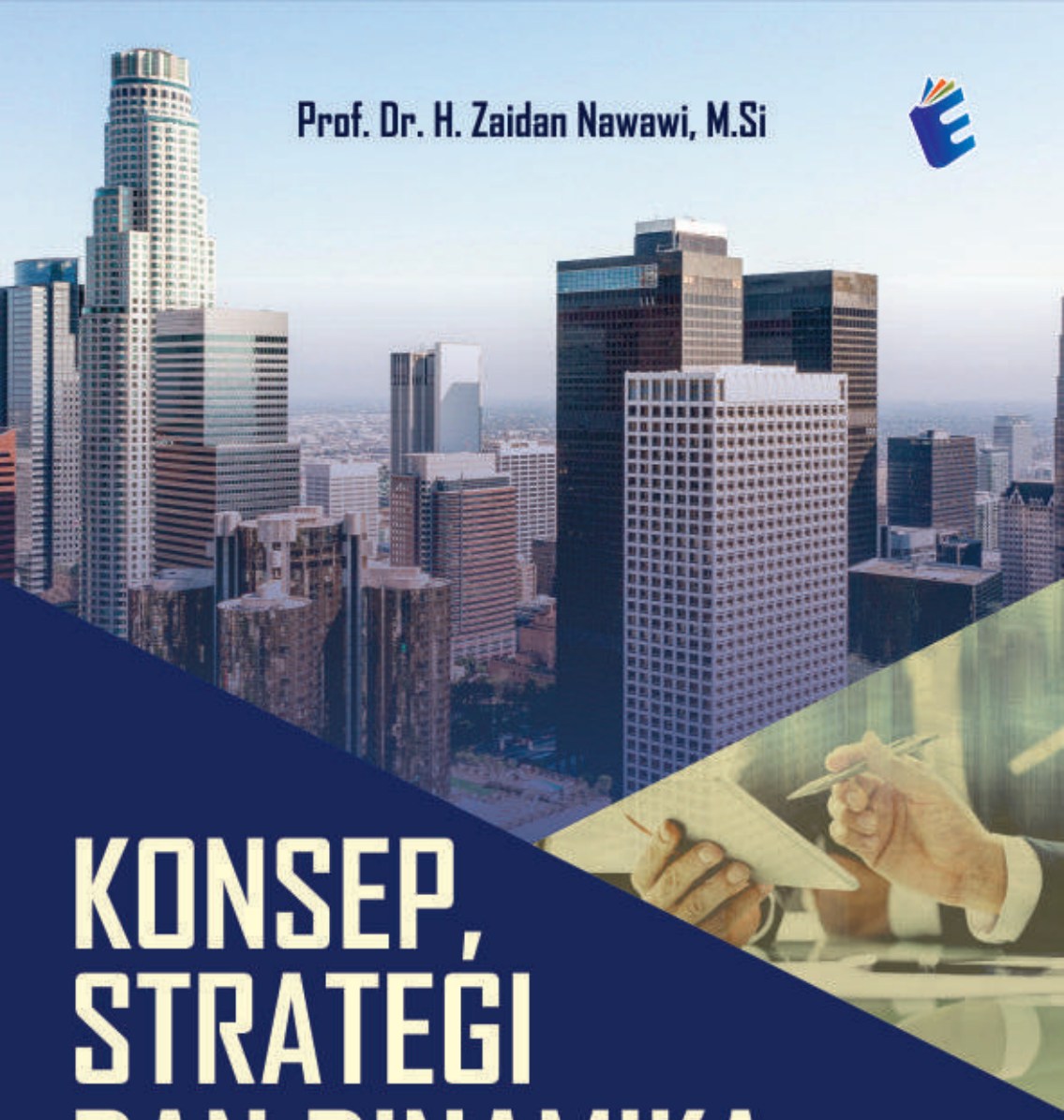

KONSEP, STRATEGI DAN DINAMIKA

KEBIJAKAN OTONOMI/PEMERINTAHAN DAERAH

KONSEP, STRATEGI DAN DINAMIKA
KEBIJAKAN OTONOMI/PEMERINTAHAN DAERAH

Biografi

Prof. Dr. H. Zaidan Nawawi, M.Si

Dosen Tetap Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Aprin Palembang dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti. Lahir tanggal 8 September 1960 di Banding Agung Ranau Sumatera Selatan.

Pendidikan tinggi formalnya diawali dengan strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Parahyangan Bandung pada tahun 1984, dilanjutkan dengan strata dua (S2) pada Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran Bandung tahun 1994 dan gelar Doktor di peroleh dari Universitas Satyagama Jakarta tahun 2005.

Buku yang sudah diterbitkan :

1. Buku Pemerintahan Daerah (Dalam Bingkai Negara Kesatuan) Tahun 2007
2. Buku Metode Penelitian Sosial (Terapan dan Kebijakan) Tahun 2008
3. Buku Sistem Politik dan Pelaksaan Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2009
4. Buku Pengawasan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Tahun 2009
5. Buku Dinamika Politik Ekonomi Otonomi Daerah Tahun 2010
6. Buku Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia (Dalam Perspektif Infra dan Suprastruktur Politik) Tahun 2011
7. Buku Manajemen Pemeritahan Tahun 2012
8. Buku Kebijakan Publik Tahun 2013
9. Buku Manajemen Pemerintahan Tahun 2014
10. Buku Efektivitas Pelayanan Pembangunan Tahun 2015
11. Buku Sistem dan Faktor-Faktor Kunci Manajemen Pemeritahan Daerah 2020
12. Buku Kontestasi Politik Identitas 2021
13. Buku Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada 2021

eureka media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-202-6
9 786234 872026

KONSEP, STRATEGI DAN DINAMIKA KEBIJAKAN OTONOMI / PEMERINTAHAN DAERAH

Prof. Dr. Zaidan Nawawi, M.S.i

eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

KONSEP, STRATEGI DAN DINAMIKA KEBIJAKAN OTONOMI / PEMERINTAHAN DAERAH

Penulis : **Prof. Dr. Zaidan Nawawi, M.S.i**

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-202-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Konsep, Strategi Dan Dinamika Kebijakan Otonomi / Pemerintahan Daerah". Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Ada banyak makna dan perspektif yang bisa digunakan dalam melihat dan memaknai otonomi . Otonomi bukan hanya soal teknis dan manajerial atau administrasi pemerintahan, otonomi itu bukan hanya berkaitan dengan upaya melakukan tugas pemerintahan secara efektif dan efisien, tetapi otonomi yaitu bagaimana melaksanakan tata kelola pemerintahan yang harmonis antar daerah, serta berkaitan dengan aspek sosial, politik, dan budaya yang melingkupi daerah dan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB 1 KONTEKS DAN DASAR KEBIJAKAN OTONOMI / PEMERINTAHAN DAERAH 1
A. Perspektif Dasar Konseptual Dan Dinamika Otonomi daerah 1
B. Arus Balik Otonomi Daerah 6
C. Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, Otonomi Luas 11
D. Otonomi Yang Tidak Harus Seragam 16
E. Logika Pembentukan dan Keragaman Daerah Otonom 21
F. 'Dinamika' Otonomi Daerah 26
G. Konsep Desentralisasi Versus Sentralisasi 31
H. Konsep Desentralisasi, Dekonsentrasi dan *Medebewind* 38
I. Model dan Pencapaian Tujuan Otonomi 45
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN DINAMIKA KEBIJAKAN ADMINISTRASI DAERAH OTONOM 52
A. Derajat Otonomi dan Ruang Lingkup Kewenangan 52
B. Distribusi dan Pemencaran (Devolusi) Kewenangan 57
C. Sistem dan Bentuk Otonomi 63
D. Otonomi Daerah Dalam Konstitusi 71
E. Dinamika Otonomi Di Era Kolonial 76
F. Dinamika Otonomi Daerah Di Era Awal Kemerdekaan 82
G. Otonomi di Masa Orba 87
H. Otonomi Daerah di Era Reformasi 93
BAB 3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DI ERA REFORMASI 99
A. Dinamika Otonomi Dalam Perspektif Implementasinya 99
B. Anomali Implementasi Otonomi Luas 104
C. Dinamika Implementasi Otonomi Luas 110
D. Beberapa Alasan Perubahan Model Otonomi 115
E. Melebarkan Peluang Perubahan Otonomi Ke 'Model Lain' 120
F. Beberapa Perubahan Penting Kebijakan Otonomi Luas 126

G. Pemantapan Implementasi Otonomi Luas.....132
BAB 4 KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEWENANGAN OTONOMI 139
A. Otonomi Bagi Bagi Uang Ke Daerah 139
B. Perspektif Manajemen Kewenangan 144
C. Dinamika Kewenangan 148
D. Konteks dan *Setting* Kewenangan 153
E. Efisiensi dan Efektifitas Kewenangan.....158
F. Manajemen Kewenangan Untuk Kemandirian.....163
G. Manajemen Kewenangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat 168
BAB 5 KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEWENANGAN OTONOMI 175
A. Belajar Dari Masa Lalu Sekaligus Berorientasi Ke Depan.....175
B. "Raja-raja Kecil, Desentralisasi Korupsi dan Kronisme" 181
C. Manajemen Kewenangan Adalah Sebuah Seni 186
D. Agenda Meningkatkan Pelayanan Berkualitas 191
E. Agenda Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 197
F. Meningkatkan Kesadaran Kewenangan dan Tanggung Jawab 203
G. Harmonisasi Hubungan Antar Pemerintahan Daerah Otonom.....208
DAFTAR PUSTAKA 214
TENTANG PENULIS 218

KONSEP, STRATEGI DAN DINAMIKA KEBIJAKAN OTONOMI/PEMERINTAHAN DAERAH

Prof. Dr. Zaidan Nawawi, M.S.i

BAB 1

KONTEKS DAN DASAR KEBIJAKAN OTONOMI / PEMERINTAHAN DAERAH

A. Perspektif Dasar Konseptual Dan Dinamika Otonomi daerah

Secara struktur kelembagaan, kata pemerintah daerah merujuk pada sebuah organisasi publik, sementara kata otonomi atau otonom yang dilekatkan pada kata pemerintah daerah adalah merujuk pada sebuah kondisi dan sifat dari pemerintah daerah. Apa yang disebut kondisi dan sifat itu bisa berubah ubah alias dinamis karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan stratejik dimana pemerintahan daerah itu berada. Pada situasi dan kondisi tertentu organisasi pemerintahan daerah bisa memiliki otonomi yang kuat dan optimal dalam pelaksanaannya dalam arti memiliki tingkat kebebasan dan kemandirian yang tinggi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kewenangannya. Tetapi dalam kondisi dan lingkungan sosial politik yang berbeda bisa berada dalam kondisi terkekang dan hanya menjadi unsur pelaksana dari organisasi yang ada di atasnya alias hanya sedikit memiliki otonomi.

Konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia sepanjang sejarahnya bisa dipahami dalam rumusan sederhana tersebut yang secara faktual memang mengalami pasang surut, baik dalam artiam normatif atau praksis. Dinamika atau perkembangan otonomi tersebut bisa terjadi dalam rezim pemerintahan yang sama atau dalam rezim pemerintahan yang berbeda. Juga dalam sistem sosial politik yang sama atau yang secara diametral dianggap berbeda. Di era reformasi yang menerapkan otonomi luas dan nyata juga ada dinamika otonomi dalam arti ada semacam pasang surut baik dalam arti kebijakan

BAB 2

RUANG LINGKUP DAN DINAMIKA KEBIJAKAN ADMINISTRASI DAERAH OTONOM

A. Derajat Otonomi dan Ruang Lingkup Kewenangan

Derajat otonomi dalam arti besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sekarang ini tentu sangat berbeda dengan derajat otonomi ketika masih berlaku UU No 4 tahun 1974. Derajat otonomi daerah yang berlaku di era Orde Baru itu sangat rendah, sebaliknya yang berlaku sekarang ini sangat tinggi karena hampir semua lingkup kewenangan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik ditetapkan sebagai kewenangan pemerintahan daerah. Sekarang ini tidak ada yang namanya tingkatan daerah otonom karena semua kewenangan otonomi yang dikelola pemerintah daerah itu dipertanggungjawabkan secara otonom melalui sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku, misalnya kepada lembaga legislatif (DPRD) atau melalui sistem akuntabilitas publik pada umumnya.

Sungguh kewenangan yang sangat besar dari aspek jumlah atau kuantitasnya dibandingkan dengan jumlah kewenangan pemerintah pusat yang hanya enam jenis kewenangan yang disebutkan secara limitatif. Meskipun dari aspek jumlah atau jenis kewenangan pemerintah pusat terbilang sedikit, namun jangan diartikan bahwa secara kualitas menjadi kurang penting. Jumlah atau jenis kewenangan pemerintah pusat memang sedikit dan limitatif, tetapi secara kualitas sangat penting dan menentukan keseluruhan 'organ' dan sistem pemerintahan secara nasional dimana pemerintahan daerah ada di dalamnya.

BAB 3

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DI ERA REFORMASI

A. Dinamika Otonomi Dalam Perspektif Implementasinya

Dinamika otonomi itu bukan hanya sebuah catatan sejarah yang miskin makna, meskipun banyak diantaranya yang sekedar memuat catatan berupa perubahan kebijakan yang mengatur otonomi. Jika dibaca dan dilihat dalam perspektif yang luas, maka dinamika otonomi itu memuat pula sejumlah makna, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung, sehingga keberadaannya tidak hanya sekedar rangkaian catatan daftar perubahan kebijakan dan peristiwa. Ada sejumlah makna dan pelajaran yang bisa dipetik, meskipun kebijakan otonomi dan sejumlah perubahannya belum pernah diimplementasikan secara efektif.

Sejumlah kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan atau bahkan kegagalan dalam melaksanakannya adalah sebuah pelajaran berharga. Pelajaran tersebut memberi bekal untuk selanjutnya membuat kebijakan yang lebih baik atau untuk memperbaiki sejumlah kesalahan agar tidak terulang atau terjadi di masa berikutnya. Dinamika otonomi yang terjadi di era kolonial membawa pengaruh terhadap perkembangan otonomi di era awal kemerdekaan. Meskipun kebijakan otonomi di era awal kemerdekaan itu belum bisa diimplementasikan secara efektif, tetapi hal demikian juga membawa pengaruh terhadap kebijakan otonomi di era Orde Baru yang melahirkan Undang undang No 5 tahun 1974.

Kebijakan otonomi di era Orde Baru bisa dianggap lancar dalam pelaksanaannya hingga berlangsung dalam kurun waktu

BAB 4

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEWENANGAN OTONOMI

A. Otonomi Bagi Bagi Uang Ke Daerah

Dana otonomi yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah memang menjadi berlipat lipat dibandingkan di era Orde Baru ketika pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan yang ada di daerah, padahal statusnya adalah daerah otonom. Dana besar yang dikelola secara mandiri oleh daerah otonom adalah konsekuensi dari kewenangan besar yang juga diserahkan dan menjadi tanggung jawab daerah otonom. Ada banyak dan jenis kewenangan yang dikelola yang semuanya masuk kategori sebagai pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari logika kewenangan besar tersebut yang membawa konsekuensi diberikannya dana yang juga besar, yang mininal dianggap bisa memenuhi kebutuhan pendanaan bagi daerah yang bersangkutan.

Dana besar yang digelontorkan ke kas daerah untuk dikelola dan diadministrasikan secara mandiri oleh daerah otonom itu nampak seperti sebuah dana yang dibagi bagi atau dikucurkan dari pusat untuk diserahkan kepada daerah untuk digunakan bagi keperluan dan kepentingan daerah. Cara berpikir sederhana ini masih melekat hingga sekarang khususnya di sejumlah daerah otonom baru dan daerah lain yang tingkat pemahaman tentang otonomi masih tergolong rendah. Masyarakat hanya mengatahui bahwa di era otonomi luas itu ada banyak dana yang dikelola pemerintah daerah, sehingga ada harapan dari sebagian masyarakat agar mendapat

BAB 5

PROSPEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI LUAS DAN BEBERAPA AGENDA KE DEPAN

A. Belajar Dari Masa Lalu Sekaligus Berorientasi Ke Depan

Otonomi luas sebagai pilihan kebijakan yang berlaku sekarang ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan model otonomi yang pernah berlaku sebelumnya. Ada banyak pelajaran yang diperoleh dari kebijakan dan praktik otonomi di masa lalu, termasuk kebijakan otonomi yang belum benar benar diimplementasikan sebagaimana yang terjadi di era awal kemerdekaan karena seringnya dirubah dan diperbaiki sehingga belum nampak jelas sosok dan bentuknya serta hambatan permasalahan yang dihadapi dan hasil yang diperoleh. Di era Orde baru juga banyak pelajaran yang bisa diambil, sehingga muncul semacam sintesis model otonomi luas seperti yang berlaku hingga kini.

Model otonomi yang berlaku sekarang ini jangan diasumsikan akan demikian adanya dalam arti tanpa perubahan. Prinsip dasarnya mungkin tidak berubah drastis, tetapi potensi untuk berubah model dan polanya bisa saja terjadi jika ada kondisi empiris dan manajerial yang menghendaki demikian. Model otonomi yang berlaku sekarang ini harus diposisikan sebagai strategi organisasi pemerintahan daerah dalam mengelola organisasi dalam mencapai tujuannya. Model otonomi luas bukanlah sebuah ideologi negara atau pemerintahan yang relatif kenyal terhadap perubahan, tetapi hanya sebuah strategi dalam mencapai tujuan organisasi agar semakin ekonomis, efektif dan efisien pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Conyers, D. 1983. "Decentralization : the latest fashion in development administration?." P*ublic Adminstration and Development,* Vol. 3, 97-109.

Conyers, D. 1986. "Decentralization and development : a framework for analysis". *Community Development Journal*, Vol. 21, number 2, April, 88-100.

Cohen. John M & Stephen B. Peterson, 1999., *Administrative Decentralization: Strategies for Developing Countries*, Connecticut: Kumarian.

Ehtisham Ahmad & Bert Hoffman, "Indonesia : Decentralization-Opportunities and Risks," dalam Seminar "Indonesia: Decentralization Sequencing Agenda," Jakarta, Maret, 2000.

Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.

Gie, The Liang. 1968 (a). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia.* (Buku I) Gunung Agung, Jakarta.

Hidayat, Syarif, 2006., *"Decentralization untuk Pembangunan Daerah"* dalam Jurnal Hukum *Jentera* Edisi 14-tahun IV Oktober-Desember 2006, PSHK: Jakarta.

Hoessein, Benyamin, 2001. "Prospek resolusi kebijakan dan implementasi otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara", *Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonorni Daerah dalam Kerangka Good Governance* yang diselenggarakan Pusat Kajian Kinerja Otonomi. Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jakarta : 30 Oktober.

Hoessein, Benyamin, 2001. "Kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam pelaksanaan otonomt daerah." *Makalah dalam seminar. Pemberdayaan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional* Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl.Jakarta: 30-31Oktober.

Hoessein., Bhenyamin , 2003., "Penyempurnaan UU No. 22 tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945", *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII*, BPHN, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Joeniarto, 1979. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jha, S. N & P.C. Mathur, 1999., *Decentralization and Local Politics*, New Delhi: Sage Publication.

Kaloh, J., 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah,* PT Rineka Cipta: Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2000., Reorganisasi dan Restrukturisasi Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001, *Yogyakarta, 11 Desember 2000* http://www.geocities.com/aripsda/makalah/format.htm

Kaho, Josef Riwu, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Koesoemahamadja,R.D.H., 1978, *Fungsi & Struktur Pamongpraja*, Alumni, Bandung.

Koesoemaatmadja, R. D. H., 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Binacipta.

Manan, Bagir, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Manan, Bagir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta.

Mawhood, Philipe. 1987. *Local Government in the third world the experience of tropical Africa*, New York: Jhon Wiley & Sons

Muslimin, Amrah, 1978. *Aspekaspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung .

McAndrews, Colin & Ihlasul Amal. 2003. *Hubungan Pusat –Daerah Dalam Pembangunan*, Yogyakarta Press.

Moh. Mahfud MD, 2000., "Otonomi daeah Sebagai Keharuan Agenda Reformasi Menuju Tatanan Indonesia Baru", *Jurnal Administrasi Negara* VoL I, No. 1, September 2000 :1-10

Muluk, M.R. Khairul, "Desentralisasi Teori Cakupan & Elemen", *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II No. 02 Maret 2002.

Rondinelli. Denis. 1981. *Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries.* IRAS.

R.Tresna, tt., *Bertamasya ke Taman Ke tatanegaraan,* Dibya, Bandung.

S.H. Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta..

Syafrudin, Ateng, 1976, *Pengaturan Koordimasi Pemerintahan di Daerah,* Tarsito, Bandung,

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance*, Penerbit Mandar Maju: Bandung, hal., 21.

Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Supriatna, Tjahja, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah,* Bumi Aksara, Jakarta..

Smith, B. C. 1985. *Decentralization : The Territorial Dimension of the State*. London : George Allen & Unwin.

Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2007.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan Puskap: Jakarta.

Utomo, Warsito, 2000," Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Implikasi Otonomi,"*Makalah*, Magister Ekonomi Pembangunan UGM, Yogyakarta.

Wibawa, Samodra. 2005. *Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta* : Gadjah Mada University Press.

Wasistiono, Sadu, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*. Bandung : Fokusmedia.

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. H. Zaidan Nawawi, M.Si

Dosen Tetap Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Aprin Palembang dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti. Lahir tanggal 8 September 1960 di Banding Agung Ranau Sumatera Selatan.

Pendidikan tinggi formalnya diawali dengan strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Parahyangan Bandung pada tahun 1984, dilanjutkan dengan strata dua (S2) pada Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran Bandung tahun 1994 dan gelar Doktor di peroleh dari Universitas Satyagama Jakarta tahun 2005

Buku yang sudah diterbitkan :

1. Buku Pemerintahan Daerah (Dalam Bingkai Negara Kesatuan) Tahun 2007
2. Buku Metode Penelitian Sosial (Terapan dan Kebijakan) Tahun 2008
3. Buku Sistem Politik dan Pelaksaan Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2009
4. Buku Pengawasan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Tahun 2009
5. Buku Dinamika Politik Ekonomi Otonomi Daerah Tahun 2010
6. Buku Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia (Dalam Perspektif Infra dan Suprastruktur Politik) Tahun 2011
7. Buku Manajemen Pemeritahan Tahun 2012

8. Buku Kebijakan Publik Tahun 2013
9. Buku Manajemen Pemerintahan Tahun 2014
10. Buku Efektivitas Pelayanan Pembangunan Tahun 2015
11. Buku Sistem dan Faktor-Faktor Kunci Manajemen Pemeritahan Daerah 2020